



Contents lists available at Journal IICET
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: 2477-8524(Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka *stunting* berdasarkan perpres 72 tahun 2021

Suci Rahmadani^{*)}, Syofiati Lubis

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 18th, 2023
Revised Feb 21th, 2023
Accepted Mar 26th, 2023

Keyword:

Peran pemerintah
Stunting

ABSTRACT

Kajian ini bermaksud menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pencegahan stunting di kecamatan lubuk pakam yang fokus terjalankan sejak 2021. Yang mana stunting merupakan terhambatnya pertumbuhan seorang anak dari pertumbuhan rata rata anak pada usianya. Tujuan pembahasan ini agar mengetahui upaya serta efektifitas yang ditimbulkan oleh pemerintah pada masyarakat. Penelitian ini juga bermaksud agar mengetahui bagaimana kebijakan rancangan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang di buat oleh pemerintah akan dilihat berdasarkan pada analisis kebijakan publik dan indikator permasalahan yang ditemukan dalam pengimplmrtasian kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dana pendekatan deskriptif. Sumberdata juga didapatkan dari hasil wawancara dengan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan stunting Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting di Kecamatan Lubuk Pakam perlahan mengalami penurunan dilihat dari angka stunting kabupaten deli Serdang yang berada di 12,5% pada tahun 2021 dan dibandingkan dengan angka stunting 13,9% pada 2022. Rendahnya angka stunting di kabupaten merupakan hasil keberhasilan dari peran pemerintah yang memberikan upaya upaya dalam pembangunan fasilitas Kesehatan serta menanamkan penting nya memeriksa anak sejak dini. Meskipun masih dalam tahap penurunan ada juga kekurangan yang harus dituntaskan yakni masih minimnya masyarakat yang berpartisipasi dalam merutinkan pemeriksaan stunting, yang akan menjadi target selanjutnya bagi pemerintah.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Rahmadani, S.,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: suciramdaniannur@gmail.com

Pendahuluan

Stunting merupakan keadaan dimana terdapat gangguan pada pertumbuhan fisik yang ditandai dengan terhambatnya kecepatan pertumbuhan maupun turunnya IQ pada anak secara bertahap, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Hal ini menunjukkan dua ciri nyata pada seseorang yakni fisik dan mental. Dimana fisik menunjukkan keadaan tubuh yang pendek diidentifikasi dengan membandingkan pertumbuhan standar pada populasi normal sesuai dengan usianya atau berdampak pada perkembangan pola pikir yang mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak (Trihono, 2015). Anak yang beratnya lebih rendah sering dikarenakan makanan yang tidak bergizi atau adekuat, serta pelayanan Kesehatan yang tidak layak yang menyebabkan sering terjadi infeksi dalam masa

perubahan yang akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sehingga menghasilkan anak yang mengalami *stunting* (Apriluana, 2018).

Masa pertumbuhan anak usia dini harus diberi perhatian khusus baik dari segi fisik, emosi, ataupun psikososialnya. Usia dini mencakup dari angka 0-3 tahun pada anak yang mana merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan anak yang dapat disebut juga sebagai *Golden age*. Masalah kekurangan gizi yang juga dialami oleh beberapa anak disaat cenderung memilih makanan yang akan mereka konsumsi (Ratna Zahara, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang strategi percepatan penurunan *stunting* sebesar 14% yang dimana pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* untuk setiap tahunnya dibutuhkan 2,7% agar mencapai angka yang diinginkan pada tahun 2024 mendatang (presidenri.go.id, 2021). Permasalahan *stunting* di Indonesia menjadi perhatian penuh oleh Presiden, dengan upaya dibuatnya strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan berbagai macam sektor, mulai dari pemerintahan swasta, akademisi, masyarakat filantropi serta media massa yang berada dibawah koordinasi wakil presiden (Yayuk, 2020). Semua pihak didorong untuk berkerja sama dalam upaya menekankan angka penurunan *stunting* hingga mencapai 14% pada tahun 2024 mendatang.

Presiden Indonesia mengkhususkan BKKBN dalam menjalankan target penurunan angka *stunting*. Dengan diberikan tugas yakni, menjaga pertumbuhan penduduk dengan seimbang serta mengupgrade kualitas keluarga Indonesia menjadi lebih baik. BKKBN kemudian menetapkan peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting* Indonesia tahun 2021-2024. Mengajak kementerian yang memiliki wewenang dan menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, seperti kementerian sosial, kementerian Pendidikan, kementerian PUPR (pekerja umum dan perumahan rakyat) yang berperan dalam lingkungan hidup sehat, kementerian dalam negeri yang berperan dalam dukungan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hingga tingkat daerah untuk menyusun strategi langkah, detail, serta struktur berdasarkan pemetaan angka *stunting* yang diukur dari data yang telah ada (Dadi, 2021). Kerjasamadilakukan agar mendorong pemerintah dari segala aspek mengintegrasikan program kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang tepat sasaran. BKKBN juga telah menyiapkan beberapa pilar langkah terkait dengan penurunan angka *stunting*, kalima pilar tersebut meliputi komitmen, kesadaran pencegahan *stunting*, konvergensi, menyediakan pangan baik, melakukan inovasi dan trobosan data yang baik (mpr.go.id, 2023).

Kini *stunting* menjadi permasalahan yang amat serius karena pengaruhnya berdampak besar pada kecerdasan dan produktifitas generasi bangsa. Jika di hubungkan dengan konteks kebijakan pemerintah bidang kesehatan saat ini Indonesia menjadi salah satu yang memfokuskan kepada permasalahan *stunting*. Jika dilihat dari catatan riset kesehatan, Indonesia termasuk kedalam daftar lima besar sebagai negara dengan status balita yang menderita *stunting* dengan angka 37,2% pada tahun 2013 mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 30,8% mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebanyak 26,9% dan kembali lagi menurun pada 2021 sebesar 24,4% turun Kembali di tahun 2022 sebesar 21,6% Hasil SGGI (Budi G. sadikin, 2021). Hasil SGGI merupakan pacuan pengukuran angkastunting di Indonesia. Yang mana sebelumnya SGGI ini di ukur 3 sampai 5 tahun sekali. Namun sejak *stunting* menjadi fokus Indonesia maka pemeriksaan data SGGI dilakukan pada setiahtahunnya. Dengan itu pemerintah optimis mengetahui target dalam mencapai angka 14% pada tahun 2024 dengan mempertegas regulasi *stunting* sehingga harus diperhatikan sejak masa kelahiran (Rokom, 2023).

Pemerintah juga mendorong aksi dari Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 dengan keluarnya kebijakan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Dalam aksi pembangunan jangka menengah nasional di prioritaskan dari aspek pembangunan dengan menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi (Irmada, 2021). Agar mencapai target, pemerintah melakukan dua intervensi holsik yakni dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Yangmana intervensi spesifik ditunjukkan pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerjasama lintas sektor yakni, menyediakan air bersih, pelayanan Kesehatan, serta mengadakan penyuluhan tentang gizi (Triyono, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dinyatakan bahwa efektivitas dari kebijakan tidak akan tercapai bila tidak terpecahkannya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan tersebut gagal, akan tetapi adakalanya kebijakan publik yang hasilnya tidak langsung terukur dalam jangka pendek dan membutuhkan proses tertentu untuk mengetahui efektifitas implementasi dari sebuah peraturan (Adriana, 2021). Maka, secara teoritis kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat kompleks, yang

dimana menuntut adanya standar baku dalam mengukur tentang layak atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik juga telah mendefinisikan dengan meninjau sebuah konteks penerapan dalam penciptaan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan publik akan bertuju kepada beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka melalui penelitian ini, peneliti memfokuskan pada aspek relevansi kebijakan publik dan fakta penerapan dilapangan guna melihat efektifitas dan sejauh mana kinerja pemerintah dalam menanggapi stunting di kecamatan lubuk pakam untuk mencapai target PerPres 72 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini juga mengetahui upaya serta efektifitas yang ditimbulkan oleh pemerintah pada masyarakat.

Metode

Menegenai kebijakan dalam pencegahan stunting yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam membutuhkan penelitian yang mendalam mengenai implementasi peraturan, instansi pemerintahan, pengaplikasian serta upaya pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam dalam menangani stunting. jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan data primer yang akurat dan terpercaya melalui wawancara serta observasi langsung pada Kantor Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kecamatan Lubuk Pakam yang merupakan tingkat pemerintahan pertama yang andil dalam penanganan stunting di kecamatan lubuk pakam. Penelitian ini menggunakan dasar hukum normaif yang merujuk pada prinsip prinsip dalam mengatur tindakan kebijakan pemerintah, yang memfokuskan kepada sumber data sekunder bersumber dari 6 artikel news, 11 jurnal internet, dan 4 buku, kemudian data yang di peroleh dibandingkan dengan data stunting pada tahun sebelumnya mencakup tentang strategi dan upaya pencegahan stunting serta menunjukkan efektifitas kinerja pemerintah yang berkerah di Kecamatan Lubuk Pakam terhadap kebijakan dari pemerintah pusat.

Hasil dan Pembahasan

Stunting Secara Global dan Nasional

Penurunan angka stunting merupakan program nasional yang didasarkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 tahun 2021 tentang target penurunan stunting 14% pada tahun 2024. Aturan ini dituju kepada instansi terkait, dengan dirancangnya program intervensi penurunan angka stunting dari pemerintah yang melibatkan berbagai sektor kementerian maupun lembaga. Sejak mula program stunting di laksanakan pada 2018, lokasi usut stunting terus menerus bertambah pada setiap tahunnya. Diketahui ditahun 2018 terdapat 100 kabupaten di 34 provinsi di perluas lagi pada tahun 2019 menjadi 160 kabupaten/kota diperluas lagi 260 kabupaten atau kota di tahun 2020, dan menjadi 360 kabupaten/kota pada tahun 2021 (tnp2k, 2017) Jumlah lokasi usut penurunan stunting demikian bertambah demi cita cita Indonesia melalui perpres 72 tahun 2021. Dengan adanya Kerjasama dari semua pihak diharapkan dapat mencapai target angka sustainable devloment goals (SDGs) yakni penurunan hingga mencapai angka 40% pada tahun 2025 (Zainul, 2021).

Untuk menganalisis kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Lubuk Pakam, perlu dikaji berdasarkan aspek yang menjadi point dalam kesinambungan kebijakan antar pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Yang ditanggapi oleh pemerintah desa sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dibawah kaki tangan pemerintah kecamatan. Beberapa hal yang menjadi perhatian fokus pada kecamatan lubuk pakam yakni melihat dari tingkat efektifitas implementasi dari kebijakan kecamatan lubuk pakam sebagai tindak lanjut dari program pemerintahan pusat. Porsi kebijakan yang diukur dari segi anggaran yang menjadi pendukung berjalannya program program yang ada, kebijakan yang mencakup kesedian fasilitas Kesehatan dan juga sumber daya manusia yang menjadi pokok terdepan dalam penanganan penurunan stunting.

Implementasi Peraturan Serta Peran dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting

Dalam penanganannya Kabupaten Deli Serdang telah membentuk sistem koordinasi dan konvergensi penanganan stunting dari Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan yang merujuk kepada Peraturan Bupati 5.A tahun 2020 yang mengatur pada ketentuan umum, asas, tujuan dan maksud dalam penanggulanagn stunting. Dalam merumuskan kebijakan dan program, pemerintah melibatkan berbagai aktor sehingga mendapat berbagai perspektif yang berbeda mengenai penanganan stunting.

Pada tingkat Kecamatan, peran stunting Lubuk Pakam dituju kepada PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan puskesmas setempat. Dengan menjalankan berbagai program pemerintah PLKB tidak turun langsung, menangani hal ini maka dibentuklah surat Sekertaris Daerah Kabupaten Deli Serdang

Nomor 463/3328 tanggal 30 september 2021 tentang pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kelurahan. Bahwa dalam rangka percepatan penurunan Stunting Kabupaten Deli Serdang perlu untuk membentuk TPK di setiap desa yang menjadi pendamping langsung kepada kelompok sasaran yang beresiko stunting. TPK yang dimaksud yakni dengan dibuatnya kader PKK, dan bidan yang berurusan langsung kepada masyarakat sasaran usut stunting demi menjalankan program pemerintahan yang ada.

Dalam kinerjanya Bupati Deli Serdang membuat Keputusan dengan menerbitkan SKTPPS Deli Serdang No. 90 Tahun 2022, tentang pembantuan kelembagaan tim audit percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Deli Serdang. Yang di rancang pada tanggal 26 januari 2022 (sumut antara news, 2022). Sejak awal pembentukan TPPS berjalan baik dengan adanya dukungan seluruh stakeholder tingkat kabupaten, PLKB (Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana) ikut andil untuk menciptakan keluarga yang sejahtera di tingkat kecamatan dan TPK (tim plaksana kegiatan) yang tertuju kepada kader PKK dan bidan di desa.

Sasaran Usut Beresiko Stunting Pada Kecamatan Lubuk Pakam

Kepada perangkat Kecamatan dan Desa yang merupakan perangkat paling dekat dengan masyarakat harus memastikan betul sasaran prioritas penerima manfaat. Disamping itu pemerintah Kabupaten memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta melakukan pendataan cakup dan intervensi secara rutin guna mendapatkan data penerima manfaat sehingga tidak satupun terlewatkan (Mahanani, 2021).

Sasaran usut stunting meliputi remaja putri dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, calon pengantin dengan edukasi penyuluhan, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak usia 0-59 bulan dengan memberikan vitamin A dan zinc. Bayi yang telah lahir juga diperhatikan sejak masa kelahirannya hingga 1000 hari kelahiran yakni pemberian makan bayi dengan gizi optimal demi meningkatkan kualitas hidup kecamatan Lubuk Pakam (Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, 2021).

Semua dilakukan dengan anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang turun langsung ke BKKBN Deli Serdang sebesar 8 Miliar rupiah yang di sebar di berbagai kecamatan deli Serdang. Dana tersebut di alokasikan untuk kepentingan seputar stunting dengan kebutuhan kebutuhan dari setiap kecamatan yang berbeda-beda.

Upaya Serta Program Pemerintah Dalam Penanganan Stunting di Kecamatan Lubuk Pakam

Kebijakan praturan bupati yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang mana berisi semua kepala desa harus menganggarkan dari anggaran desa untuk kegiatan stunting yang mana setiap OPD memberi kegiatan langsung. Peraturan Bupati ini mengkerahkan 13 Dinas terkait dan dalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memiliki program startegis yakni setiap OPD memiliki kegiatan langsung seperti, Dinas Kesehatan memberikan pemeriksaan KB, Kementerian Agama memberikan penyuluhan pranikah, Kerjasama dengan sekolah untuk remaja putri agar mengkonsumsi tablet tambah darah. Dengan melakukan perbaikan dari seluruh aspek melalui dua intervensi gunamencegah terjadinya stunting melalui asupan makanan, penyakit menular, dan Kebersihan lingkungan yang menjadi fokus pada bidang Kesehatan. Intervensi sensitif juga dilakukan yakni dilihat dari penyediaan sarana air bersih, peningkatan akses Kesehatan, peningkatan kesadaran dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak.

Adapun bentuk upaya pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang di aplikasikan kepada seluruh Kecamatan atau Desa yakni, membentuk SDM yang berjiwa saing, 1000menetapkan keputusan Bupati mengenai lokasi usut stunting, mengevaluasi data stunting secara berkala guna mengupgrade perbaikan program, melakukan kampanye komunikasi antar pribadi dalam bentuk komunikasi informasi stunting, serta mengaktifkan desa dalam melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting (Apriluan, 2018).

DASHAT (dapur sehat atasi stunting) merupakan Program BKKBN Kabupaten Deli Serdang yang di terapkan di kecamatan lubuk pakam yang mana menanggapi ibu hamil yang beresiko, anak balita atau baduta yang beresiko berkerja sama dengan puskesmas setempat dan tenaga gizi. Dengan melakukan penyuluhan tentang asupan gizi penting bagi masa pertumbuhan anak. Program perbaikan gizi bayi dan balita yang terjalankan di Kecamatan Lubuk Pakam mendapat perhatian penuh dari pemerintahdi utus oleh puskesmas ke TPK Yang merupakan program Peraturan presiden No. 42 Tahun 2013 terjalankan di kecamatan Lubuk Pakam. Yakni upaya menerapkan pemberian suplemen gizi terbukti dapat membantu tumbuh dan kembang anak (Laili, 2019).

Upaya Bupati Deli Serdang mendorong pemerintahan yang berkerah membuat rumah sehat atau rumah kesehatan untuk masyarakat yang berfungsi sebagai tempat masyarakat mengetahui dan menganalisa berbagai informasi kesehatan yang dapat diakses secara mandiri. Yang mana Kecamatan Lubuk Pakam sudah memiliki 2 puskesmas yang memfasilitasi pelayanan KB, pemeriksaan Catin, ibu hamil, pasca salin

dan posyandu. fasilitas tersebut di fasilitasi langsung oleh BKKBN Deli Serdang yang harus ada pada setiap Kecamatan/Desa yang ada di Deli Serdang.

Ada juga upaya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam pada setiap desanya yakni pemberian tablet tambah darah yang di berikan pada remaja atau ibu hamil, imunisasi dan vitamin A dan zinc pada balita. Program ini merupakan program rutin yang di jalankan dan menjadi program kerja sama antara pemerintah dengan puskesmas (Fahrur., 2023)

Program unggulan yang selalu menjadi aktivitas tetap dan disalurkan kepada seluruh desa dikecamatan lubuk pakam yakni dalam bentuk posyandu yang mengedukasi perbaikan gizi pada ibu hamil, melakukan pemantauan terhadap perkembangan janin selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan (PMT) berupa sembako pada sasaran stunting yang memiliki bayi atau balita usia 0-3 bulan yang di laksanakan oleh PKKS kecamatan di damping oleh para petugas puskesmas bidan dan kader PKK.

Faktor Penghambat Penurunan Stunting di Kecamatan Lubuk Pakam

Berdasarkan data hasil yang dianalisis peneliti pada survei lapangan pada kantor PKKS yang merupakan pemerintahan yang tugasnya pada tingkat kecamatan menangani stunting dari berbagai aspek, sedikit penyebab terjadinya penghambatan stunting di Kecamatan Lubuk Pakam. Yakni bukan disebabkan oleh tidak berjalannya PerPres yang telah dibentuk melainkan disebabkan oleh pola buruknya keragaman pangan dan rendahnya asupan vitamin masyarakat. Dan malasnya masyarakat dalam menanamkan nilai dari gizi dari suatu makanan. Yang mana hasil wawancara dengan PPKS kantor kecamatan Lubuk Pakam juga membuktikan bahwa ibu yang memiliki balita masih sedikit memahami apa itu stunting. Dengan pemahaman anak atau balita yang lahir pertumbuhannya lebih lambat merupakan faktor genetik yang tidak memerlukan penanganan lanjut. Dan juga ada Sebagian remaja putri yang masih belum mengkonsumsi tablet penambah darah secara teratur meskipun telah mendapatkan intervensi dikarenakan kurangnya minat remaja putri tersebut dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Sehingga data stunting di kecamatan lubuk pakam tidak mencakup semua sasaran yang membutuhkan. Penanganan stunting yang kini berkelanjutan meningkatkan dampak besar yang akan timbul di kemudian hari. Pencegahan stunting dapat terwujud jika meningkatkan kembali program pengembangan dapur sehat atasi stunting dengan memahami betul tujuan dari program tersebut, dan meningkatkan Kembali peran pembangunan pemerintahan yang andil untuk membangun wilayah wilayah yang bebas dari stunting (Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, 2021).

Efektifitas Program Percepatan Penurunan Stunting diKecamatan Lubuk Pakam

Keberhasilan dalam program sangat ditentukan dengan efektifitas yang terjalankan dari program itu sendiri, penelitian ini mengukur efektifitas dari beberapa aspek program apabila fungsi serta tugas para implementor terlaksana dan sesuai dengan program yang telah di rencanakan.

Berdasarkan data yang di akses oleh peneliti melalui kantor Kecamatan Lubuk Pakam terlihat bahwa fungsi pelaksanaan program berjalan dengan cukup baik. Dikarenakan terjalannya Kerjasama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang berlandaskan kepada perpres 72 tahun 2021. Implementasi peraturan juga sampai kepada kader desa dengan menjalankan semua upaya program BKKBN Deli Serdang sampai kepada tingkat masyarakat sasaran stunting.

Kabupaten Deli Serdang sudah melampaui target nasional dengan sebesar 12,5% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan Kembali pada tahun 2022 sebesar 13,9% Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan bukti bahwasanya peraturan serta program terjalankan di berbagai kecamatan dan tersalurkan kepada seluruh desa. Keberhasilan nyata dapat dinilai dari dua sistem intervensi holsik yakni dengan interversi spesifik dan intervensi sensitif. Yang dapat di dilihat langsung. Untuk intervensi spesifik terlihat pada anak dari 1000 hari angka kelahiran yang mendata lebih kurang dari 8 anak yang masih mengidap stunting yang pengobatannya berjalan hingga sekarang di dua ppukesmas yang berada di Lubuk Pakam. Untuk intervensi sensitif terdapat pada lingkunganberdasarkan pengamatan peneliti serta informasi dari tenaga Kesehatan, akses pada air bersih untuk dialirkan kepada setiap rumah tersalurkan. Dan fasilitas puskesmas Kesehatan juga sangat-sangat memadai. Adapun efektifitas yang ditimbulkan secara langsung dilapangan yakni meningkatnya koordinasi dan hubungan interaksi tim konvergensi dan tim pelaksana di lapangan sehingga penanganan kasus stunting menjadi tepat sasaran. (Gultom, 2022)

Harapan peneliti kepada Kecamatan Lubuk Pakam meningkatnya kesadaran calon pengantin untuk memeriksa Kesehatannya sebelum maupun sesudah pernikahan, tersedianya pendampingan kepala keluarga beresiko stunting oleh tim pendamping keluarga. Diperolehnya data stunting dan keluarga beresiko yang telah tervalidasi, meningkatnya kesadaran keluarga yang memiliki anak balita dan ibu hamil untu

memeriksa kesehatannya melalui program penyuluhan *stunting*, serta menurunnya angka prevalensi *stunting*.

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kinerja kecamatan Lubuk Pakam berhasil dalam menanggapi dan menangani *stunting* di kecamatan Lubuk Pakam sehingga mengalami penurunan pesat mulai dari *stunting* di terapkan yang menunjukkan angka 12,5% pada 2021 hingga mencapai 13,9% pada tahun 2022. Dengan adanya berbagai progress yang di rancang dan di jalankan oleh PPKS kecamatan yang tersalurkan kepada masyarakat demikian juga membangun target mencapai angka kesuksesan. Tujuan penelitian ini dilakukan agar melihat proses kinerja kecamatan Lubuk yakni membangun sarana Kesehatan serta mengadakan penyuluhan *stunting* rutin menunjukkan sebuah upaya bagus yang di jalankan pemerintah dalam menanggapi *stunting* ini.

Hasil penelitian juga sukses dalam menjalani dua titik intervensi holsik yang mana sukses dalam mengadakan penyuluhan rutin mengenai *stunting* dan dibuatnya berbagai fasilitas dan prasarana Kesehatan.

Referensi

- Adriana Rodina Fallo. (2021). *Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten timor tengah selatan di kecamatan kie*.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.472>
- Budi G. sadikin. (2021). *PROFIL KESEHATAN INDONESIA*.
- Dadi Ahmad Roswandi, M. Sidr. A. S. D. M. K. (2021). *Kebijakan Dan Strategi Program Bangsa Kencana*. www.elearningbkkbn.go.id
- Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. (2021). *Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021*. Dinkes Kabliserdang.
- Fahrur Rozi, M., Fadilah, A., Naqiyah Melfan, S., Akhyar, M., & Paramitha Gurning, F. (2023). Analisis Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i5.2224>
- Gultom, Y. T. (2022). Karakteristik Dan Faktor Risiko Anak Dengan Stunting Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Characteristics And Risk Factors Of Children With Stunting In Galang District, Deli Serdang Regency. *Public Health Journal*, 8(2).
- Irmada, Briawan, D., & Martianto, D. (2021). Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Percepatan Penurunan Stunting: Studi Kualitatif Di Kabupaten Bogor. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, 16(2), 86–95. <https://doi.org/10.204736/mgi.v16i2.86-95>
- Laili, U., Ariesta, R., Andriani, D., Masyarakat, P., & D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* (Vol. 5, Issue 1).
- Mahanani Mulyaningrum, F., & Mulya Susanti, M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita Di Kabupaten Grobogan*.
- Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, N. A. (2021). *Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan di Desa Buntulia Tengah*. mpr.go.id. (2023). *Komitmen Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Harus Benar Benar Direalisasikan*. <https://www.mpr.go.id/berita/Komitmen-Percepatan-Penurunan-Prevalensi-Stunting-Harus-Benar-Benar-Direalisasikan>
- presidenri.go.id. (2021). *Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Ketua Program Percepatan Penanganan 'Stunting'*. Presidenri. <https://www.bkkbn.go.id/berita-presiden-jokowi-tunjuk-bkkbn-ketua-program-percepatan-penanganan-stunting#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20menunjuk%20Badan,kekerdilan%20pada%20anak%20di%20Indonesia>.
- Rokom, R. S. N. (2023, January 25). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>
- Ratna Zahara. (2020). Gambaran Pola Pemberian Makan Pada Anak Paud Yang Stunting Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam. *Wahana Inovasi*, 9(1).

-
- sumut antara news. (2022, June 6). Pemkab Deli Serdang bertekad terus turunkan angka stunting. *Sumut.Antaraneews*. <https://sumut.antaraneews.com/berita/488801/pemkab-deli-serdang-bertekad-terus-turunkan-angka-stunting?>
- Trihono, Sudomo, M., & Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2015). *Pendek (stunting) di Indonesia: masalah dan solusinya*.
- Triyono, B., Arifiyatno, Y., & Indonesia. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Evaluasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), 2010-2014*.
- www.tnp2k.go.id. (2017). 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting). *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). *Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru "New Normal" Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang The Challenges Of Preventing Stunting In Indonesia In The New Normal Era Through Community Engagement*.
- Zainul Rahman, M. W. D. R. N. R, A. U. N. W. M. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting Relevansi Penerapan Di Masyarakat (Studi Kasus Desa Donowarih). In <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr> (pp. 1-30). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>